

DOKUMEN
ANALISIS JABATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KABUPATEN LOMBOK TENGAH

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah dapat diselesaikan. Dokumen Analisis Jabatan ini disusun guna memenuhi kewajiban Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dokumen Penyusunan analisis Jabatan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah ini berfungsi sebagai Pedoman Kerja bagi aparatur dalam melaksanakan program kepegawaian, Organisasi, Tatalaksana dan Akuntabilitas.

Dokumen Analisis Jabatan ini juga diaplikasikan untuk menyusun pedoman rencana pelaksanaan tugas-tugas rutin aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas sehari hari pada masing-masing pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.

Kami sadar bahwa Dokumen Analisis Jabatan ini Sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan dokumen ini kami harapkan dengan lapang hati saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan dokumen ini.

Praya, 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs.H.MUHAMAD

NIP. 19651231 198903 1 209
Pembina Utama Muda (IV/c)

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Kata Pengantar	i
2. Daftar Isi.....	ii
3. BAB. I . Pendahuluan.....	1
A. LATAR BELAKANG PENTINGNYA ANALISIS JABATAN.....	1
B. SASARAN DAN RUANG LINGKUP ANALISIS JABATAN.....	3
1. SASARAN.....	3
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. METODE DAN SARANA PENGUMPULAN DATA.....	5
BAB.II . Kondisi Saat Ini dan Kondisi Akan Datang.....	7
1. KONDISI SAAT INI.....	7
2. KONDISI YANG DIHARAPKAN.....	10
BAB.III . Identifikasi Masalah dan Solusinya	12
BAB.IV . Rekomendasi	15
BAB.IV . Penutup	16
4. Lampiran-lampiran.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENTINGNYA ANALISIS JABATAN

Dalam Upaya mendukung tata pemerintahan yang baik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di Kementerian dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penataan Pegawai.

Analisis Jabatan merupakan suatu proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan dan menyajikannya untuk program-program Kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan. Setiap organisasi bagaimanapun kecilnya pasti memiliki bebankerja, yang kemudian dijabarkan menjadi rumusan tugas jabatan yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan akhir. Beban kerja organisasi akan lebih cepat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna bila semua tugas dibagi habis kedalam tugas jabatan yang akan dilaksanakan sesuai fungsi dari masing-masing pemegang jabatan. Namun tidak merupakan jaminan bahwa beban kerja yang telah diuraikan dalam uraian tugas dapat dipakai sebagai tolok ukur bagi keberhasilan suatu unit organisasi dalam pencapaian tujuan.

Faktor lain yang juga ikut menentukan adalah perkembangan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, diperlukan syarat-syarat yang lebih rinci dan khusus baik faktor Sumber Daya Manusia seperti pendidikan, bakat, pengalaman dan keterampilan kerja maupun factor kebutuhan

rancangan dalam Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor :41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah..

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Analisis Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk menganalisis :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah
2. Uraian Jabatan, meliputi :
 - a. Nama Jabatan.
 - b. Kode jabatan.
 - c. Runit Kerja.
 - d. Eselon.
 - e. Kedudukan Dalam Struktur organisasi
 - f. Ikhtisar Jabatan.
 - g. Uraian Jabatan.
 - h. Bahan Kerja.
 - i. Perangkat /Alat Kerja.
 - j. Hasil Kerja
 - k. Tanggung Jawab.
 - l. Wewenang
 - m. Korelasi jabatan
 - n. Kondisi lingkungan Kerja
 - o. Resiko Bahaya

manusia itu sendiri yang terus meningkat serta sarana dan prasarana yang semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Sehubungan dengan faktor yang dikemukakan diatas, analisis jabatan dapat memberikan jawaban atau jalan keluar karena menggunakan tolok ukur yang bersifat standar baik mengenai jumlah jabatan, perumusan jabatan/uraian tugas maupun syarat-syarat pemangku jabatan dan hal-hal terkait.

Dengan demikian melalui analisis jabatan dapat dihasilkan informasi jabatan yang antara lain berupa daftar susunan jabatan pada setiap unit organisasi yang berguna bagi rencana pengembangan atau perampingan organisasi. Dari informasi jabatan akan terlihat jelas apa yang dilakukan, siapa, dengan cara bagaimana dan untuk apa dilakukan (What, How, Why) dapat menjadi acuan yang menyatakan bahwa pengusulan formasi penambahan pegawai maupun pengembangan organisasi harus didasarkan pada hasil analisis jabatan. Selain itu analisis jabatan mempunyai arti penting karena berfungsi sebagai alat bagi manajemen kepegawaian untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan sebagai dasar menyusun kebijaksanaan dan program dibidang kepegawaian khususnya dalam menetapkan jabatan dan Daftar Susunan Pegawai (DSP) pada setiap unit kerja. Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berguna untuk :

- Menetapkan jenis-jenis pekerjaan, Menetapkan tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap pegawai sesuai dengan jabatannya, Menetapkan jabatan struktural/non struktural.

- Menyempurnakan prosedur, sistem dan mekanisme kerja.
- Merumuskan nomenklatur jabatan suatu unit kerja. Penyempurnaan jabatan dari tingkat pusat, daerah sampai dengan kecamatan dan kelurahan,
- Menempatkan seseorang pada tempat dan jenis pekerjaan sesuai dengan bakat dan keahlian. Terbinanya tata hubungan kerja antara satu unit kerja

dengan unit kerja lainnya. Terciptanya prosedur kerja dibidang kepegawaian meliputi : Perencanaan kepegawaian, Formasi kepegawaian, Pengembangan kepegawaian, Pensiun, Lahirnya juklak kepegawaian, Terlaksananya kegiatan tata kerja dan ketatalaksanaan secara nasional.

Manfaat lain dengan ditetapkan analisis jabatan adalah : Untuk kepentingan waskat oleh atasan terhadap : Pelaksanaan tugas bawahan, Penilaian prestasi kerja, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atas dasar informasi, hasil kerja, tanggung jawab dalam tugas Ketaatan penyelenggaraan tugas. Efisiensi pengamanan bahan kerja dan perangkat kerja. Disiplin kerja dasar informasi, prosedur kerja, waktu kerja dan korelasi jabatan. Untuk seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan terlebih dahulu menetapkan syarat jabatan formal. Untuk rekrutmen atas dasar daftar kebutuhan pegawai, jabatan dan daftar kebutuhan syarat jabatan.

B. SASARAN DAN RUANG LINGKUP ANALISIS JABATAN

1. SASARAN

Analisis jabatan adalah suatu sistem untuk memperoleh / menetapkan tugas jabatan, nama jabatan, fungsi jabatan dan jumlah jabatan pada suatu unit kerja/kelembagaan guna mencapai visi kelembagaan, sesuai kemampuan sumberdaya manusia yang ada, agar tujuan organisasi mencapai hasil optimal. Di antara informasi yang satu sama lainnya saling terkait dalam pelaksanaan pencapaian tujuan suatu organisasi.

Analisis jabatan ini diarahkan sesuai dengan ketentuan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai

tugas,bahan dan alat kerja yang digunakan dalam penyelesaian suatu kegiatan dan data lain yang tidak dapat diperoleh dengan metode yang lain

Adapun sarana yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut ;

1. Data Nama jabatan (Kamus Jabatan BKN,Permendagri 70 Tahun 2013)
2. Formulir Nama Pemegang jabatan
3. Formulir Uraian jabatan
4. Formulir Uraian Beban kerja jabatan (Form A)
5. Perda Nomor :6 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati Lombok tengah Nomor ;20 tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan organisasi,tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah
7. Juklak dan juknis analisis jabatan dan analisis Beban Kerja
8. Bahan Pustaka
9. Informasi atasan langsung pemegang jabatan

BAB II

KONDISI SAAT INI DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Kondisi Saat Ini

Kondisi saat ini / kondisi terkini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Dinas dengan tipe B dimana Struktur Organisasinya dapat dilihat dibawah ini :

A. Struktur Organisasi :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

A. Kepala Dinas.

B. Sekretaris, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

C. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Pengembangan Iklim Investasi dan Promosi Penanaman Modal membawahi:
 - a. Seksi pengembangan iklim investasi;
 - b. Seksi promosi penanaman modal;
 - c. Seksi informasi penanaman modal.

2. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - b. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
 - c. Seksi Data.
3. Bidang Pengendali Dan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal membawahi:
 - a. Seksi Pengendali;
 - b. Seksi Pengaduan;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Data Kepegawaian

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah ditunjang oleh 33 (Tiga Puluh tiga) orang PNS dan 8 (Delapan) orang Pegawai Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jabatannya yang ada Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :
 - a. Eselon II : 1 Orang
 - b. Eselon IIIa : -
 - c. Eselon IIIb : 3 Orang
 - d. Eselon IVa : 11 Orang
 - e. Non Struktural : 18 Orang
 - Jumlah : 33 Orang

p. Syarat Jabatan

1. Pangkat/Gol.Ruang
2. Pendidikan
3. Kursus
 - a. Penjenjangan
 - b. Teknis
4. Pengalaman Kerja
5. Pengetahuan kerja
6. Keterampilan Kerja
7. Bakat Kerja
8. Temperamen Kerja
9. minat kerja
10. upaya Fisik
11. Kondisi Fisik
12. fungsi Jabatan

q. Prestasi kerja Yang Diharapkan

r. Butir informasi lain

3. METODE DAN SARANA PENGUMPULAN DATA

Metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam pelaksanaan Analisis ini adalah sebagai berikut ;

1. Metode Dokumenter digunakan untuk mengumpulkan data tentang tugas dan fungsi organisasi data Kepegawaian dan data yang berhubungan dengan itu.
 2. Metode Questioner digunakan untuk mendapatkan data jabatan seperti uraian tugas,bahan kerja,alat kerja,syarat jabatan dstnya
 3. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh kebenaran data jabatan yang sudah diisi dalam daftar questioner dan menggali data lainnya yang diperlukan seperti pelaksanaan tugas dan sebagainya.
- Metode Observasi digunakan untuk mendapatkan kelengkapan data tentang proses dan cara pelaksanaan tugas,waktu pelaksanaan

2. Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan golongannya adalah sebagai berikut :

a. Golongan IV : 4 orang.

b. Golongan III : 20 orang.

c. Golongan II : 9 orang

Jumlah : 33 Orang

3. No Jenjang Pendidikan PNS

a. SMP/Sederajat : - orang

b. SMA/SMK/Sederajat : 13 orang

c. Sarjana : 17 orang

d. Srata Dua : 3 orang

Jumlah : 33 orang

4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut tingkat Pendidikan sebagai berikut

No	Jenjang Pendidikan	PNS	PTT	Ket.
1.	SD/Sederajat	-	-	
2.	SMP/Sederajat	-	-	
3.	SMA/SMK/Sederajat	13	6	
4.	Sarjana Muda/D1-DIV/Sederajat	-	-	
5.	Sarjana (S1)	17	2	
6.	Magister (S2)	3	-	
7.	Doktor (S3)	-	-	
Jumlah		33	8	

5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut Jenis Kelamin adalah sebagai berikut

No	Jenis Kelamin	PNS	PTT	Ket.
1.	Pria	-21	-4	
2.	Wanita	-12	-4	
Jumlah		33	8	

ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai terutama untuk Pejabat yang ada paling tidak sudah melakukan Diklat Pim dan Gedung Kantor yang lebih luas hal ini mengingat Bidang Pelayanan yang ditangani mencakup semua Pelayanan Perizinan dan akan Melakukan persiapan untuk Pelayanan Online yang ada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.

Bidang Pengembangan Iklim Investasi dan Promosi Penanaman Modal, dilaksanakan oleh 1 orang Kepala Bidang dengan 3 orang Kepala seksi dan 2 orang Staf/Pelaksana Beban tugas yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Iklim Investasi dan Promosi Penanaman Modal nampak cukup besar, meliputi semua SKPD yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, terutama dalam berkoordinasi dengan Para Investor yang datang ke Kabupaten Lombok Tengah.

4. Bidang Pengendalian dan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal :

Beban tugas yang dilaksanakan oleh Pengendalian dan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal nampak sangat besar dan berat . Dengan tingginya frekuensi pelaksanaan tugas pokok yang dilaksanakan oleh 1 orang Kepala Bidang dengan 3 orang Kepala seksi dan 2 orang Staf/Pelaksana yang melaksanakan tugas dengan berkoordinasi dan melayani Semua Pengendalian dan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

B. Aspek Ketatalaksanaan.

SOP sebagian pedoman dalam melaksanakan tugas Penanamam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sudah tersedia, namun perlu disempurnakan lagi hal ini mengingat ada beberapa izin yang ada di SKPD akan menyerahkan pelayanan perizinan sehingga harus diselaraskan lagi dengan jumlah perizinan yang akan diterima anatara lain untuk Sistem informasi manajemen yang berada di SKPD belum terintegrasi menjadi satu.

C. Aspek Kepegawaian.

Dari beban kerja Dinas Penanamam modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang melaksanakan tugas yang begitu besar selama ini kurang ditunjang dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih kurang terutama petugas pelaksana/Staf; Selanjutnya untuk Tugas Bidang

6. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut Agama adalah sebagai berikut

No	Agama	PNS	PTT	Ket.
1.	Islam	31	8	
2.	Kristen	1	-	
3.	Hindu	1	-	
4.	Budha	-	-	
Jumlah		33	8	

C. Sarana Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

Kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah Sebagai berikut : Mini Bus 5 unit, Sepeda motor 11 unit, Genset 1 Unit, Server 2 unit, Laptop 13 unit, Komputer PC 12 Unit dan Wifi dan perangkat pendukung lainnya.

2. Kondisi yang diharapkan

A. Kepegawaian

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan tipe B tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah harus ditunjang oleh personel atau Pegawai yang memadai minimal 50 orang (Lima puluh orang) dengan syarat minimal pendidikan DIII dengan kualifikasi pendidikan Teknik Informatika dan Teknik Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

B. Sarana Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

Ke depan Kondisi sarana dan prasarana yang ideal untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah harus

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu yang didukung oleh 8 orang fungsional umum/Staf belum dapat melaksanakan tugas dengan optimal hal ini disebabkan oleh sebagian kualifikasi pendidikan yang tidak / belum sesuai sehingga ke depan dibutuhkan penambahan minimal 5 orang Fuungsional umum/staf. untuk Bidang pengendalian dan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal membutuhkan 3 Orang Fungsionam Umum/Staf terutama untuk Petugas Lapangan dan Operator Komputer, Bidang Pengembangan Iklim Investasi dan Promosi Penanaman Modal membutuhkan 10 Orang Fungsionam Umum/Staf terutama untuk administrasi dan Petugas Lapangan. Sedangkan untuk Kesekretariatan masih membutuhkan 6 Orang Fungsional Umum/Staf untuk petugas Pengadministrasi Kepegawaian,Pengelola Sistem informasi Manajemen Kepegawaian,Pramu Bakti,pramu kebersihan,operator komputer dan sopir.

BAB. III

IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSINYA

Berdasarkan hasil Analisa Jabatan yang telah dilaksanakan, dijumpai beberapa temuan dan permasalahan yang meliputi aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek kepegawaian sebagai berikut :

A. Aspek Kelembagaan :

1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 60 Tahun 2016 Sudah mewadahi tugas dan fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan kewenangan urusan wajib.
2. Secara khusus dalam potret analisis jabatan dan beban kerja ditemukan tingginya frekuensi beban kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam tugas mengkoordinasikan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Kinerja lembaga agar ditingkatkan dimasa kedepan. Permasalahan beban tugas pokok dan fungsi yang besar ini agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sekarang Tipe B kedepan agar ditingkatkan menjadi tipe A atau Jumlah personil Fungsional Umum/petugas pelaksanaan ditambah.

3. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

Beban tugas yang dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu nampak sangat besar dan berat. Dengan tingginya frekuensi pelaksanaan tugas pokok yang dilaksanakan oleh 1 orang Kepala Bidang dengan 3 orang Kepala seksi dan 8 orang Staf/Pelaksana yang melaksanakan tugas dengan berkoordinasi dan melayani Semua pelayanan perizinan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

BAB IV

REKOMENDASI

Dari uraian identifikasi masalah dan solusinya, dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah yang sekarang tipe B yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekerataris, Tiga Sub Bagian, Bidang Pengembangan Iklim Investasi dan Promosi Penanaman Modal dan tiga Kepala Seksi, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tiga Kepala Seksi, dan Bidang Pengendalian dan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal dan 3 Kepala Seksi, mengingat tugas dan fungsi yang begitu besar mungkin bisa ditingkatkan menjadi dinas tipe A atau penambahan Personil Fungsional Umum/Petugas pelaksanaan yang Masih kurang sekitas 42 Orang atau lebih.
2. Pejabat yag ditempatkan sebagai pejabat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mempunyai pengalaman dibidang Pelayanan Umum, Kesekretariatan dan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan mempunyai disiplin ilmu dengan bidang tugas yang akan dilaksanakan;
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah agar terus ditingkatkan mengingat tugas kedepan semakin berat.

BAB. V.

PENUTUP

Analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.

Tujuan analisis jabatan adalah untuk mendapatkan person yang sesuai atau cocok dengan pekerjaan tertentu, dan langkah yang harus dilaksanakan adalah mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis, menentukan teknik pengumpulan informasi lalu melaksanakan analisis pekerjaan, selanjutnya menentukan kriteria-kriteria orang yang tepat pada pekerjaan tertentu, melakukan perekrutan pegawai serta menempatkan pegawai pada pekerjaan yang sesuai.

Semoga hasil analisis jabatan ini dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.